

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	19
C. Keaslian Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	27
E. Tujuan Penelitian	28
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	 31
A. Tindak Pidana Korupsi	31
B. Perseroan Terbatas	56
C. Badan Usaha Milik Negara	65
1. Sejarah BUMN	65
2. Bentuk-Bentuk BUMN	86
a. Perusahaan Jawatan	93
b. Perusahaan Umum	95
c. Perseroan (Persero)	97

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	101
E. Kerugian dan Kerugian Keuangan Negara.....	142
F. Landasan Teori.....	149
1. Doktrin tentang Badan Hukum	150
2. Korupsi sebagai <i>Extraordinary Crime</i>	158
3. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	167
BAB III CARA PENELITIAN	172
A. Jenis Penelitian.....	172
B. Data Yang Dicari	177
C. Cara Mencari Data	178
D. Cara Menganalisis Data.....	184
E. Jalannya Penelitian.....	185
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	187
A. Konsep Kerugian Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas.....	187
1. Sifat Kekayaan BUMN Persero	187
a. Keuangan Negara	192
b. Kekayaan BUMN Termasuk Ke Dalam Rezim Keuangan Negara	202
c. Kekayaan BUMN Tidak Termasuk Ke Dalam Rezim Keuangan Negara	234
d. Status Keuangan BUMN dan Keuangan Negara.....	255
2. Konsep Kerugian BUMN Persero	281
B. Konsep Kepemilikan Saham Atas Badan Usaha Milik Negara	

Yang Berbentuk Perseroan Terbatas	306
1. Sifat Kepemilikan Saham	306
a. Doktrin Perihal Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum....	306
b. Pemahaman Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	317
2. Persero Dalam Teori Badan Hukum dan Sifat Kepemilikan	
Negara Pada Saham yang Dimiliki BUMN Persero	334
a. Persero Dalam Teori Badan Hukum	334
b. Konsep Kepemilikan Saham BUMN.....	337
C. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Menjadi Syarat Bahwa Keputusan	
Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk	
Perseroan Yang Termasuk Dalam Kualifikasi Tindak Pidana	
Korupsi	350
1. Kejahatan Korporasi BUMN Dan/Atau Pengurus BUMN	
Dan Pentingnya Pemidanaannya	350
a. Kejahatan Korporasi Sebagai <i>White Collar Crime</i>	350
b. Pentingnya Pemidanaan Terhadap Korporasi dan/atau	
Pengurus Korporasi Pelaku Kejahatan.....	363
c. Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Persero dan/atau	
Pengurus atau Direksi Persero Dengan Menggunakan Persero	
Yang Dikelolanya	366
2. Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan dan Pengambilan Kebijakan	
Bisnis BUMN	380
a. <i>Business Judgement Rule</i>	385
b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	404
3. Kebijakan Bisnis Direksi BUMN Yang Patut Dipidana.....	419

a. Hukum Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Administrasi.....	419
b. Prinsip Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remidium</i>	428
c. Kasus Pemidanaan Direksi BUMN Yang Tidak Tepat (Studi Kasus Dugaan Korupsi Hotasi Nababan – Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines).....	441
d. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Digunakan Sebagai Syarat Untuk Mempidanakan Direksi BUMN	450
4. Strategi Pengembangan dan Manajemen Risiko BUMN	482
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	487
A. Kesimpulan.....	487
B. Saran.....	489
DAFTAR PUSTAKA	491
RIWAYAT HIDUP	524